



## **PEMUTUSAN SEMENTARA JARINGAN SIAK DUKCAPIL KOTA MAKASSAR**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Makassar mendapat sanksi pemutusan jaringan terhadap Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Pemutusan SIAK ini mulai terjadi sejak 8 Januari 2020 hingga beberapa hari ke depan. Akibatnya pelayanan kependudukan bagi warga kota Makassar seperti pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan lainnya terhenti. Dengan begitu, terjadi penumpukan pembuatan data kependudukan di Kota Makassar. Menyikapi persoalan offline SIAK ini, Ombudsman Makassar lalu menginvestigasi dan menemukan adanya pelanggaran yakni Disdukcapil Kota Makassar tidak menanggapi surat dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar Andi Ihwan Patiroy sudah melaporkan persoalan Disdukcapil Kota Makassar dan akan menyampaikan hasil investigasinya kepada PJ Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb.



Dari penelusuran Ombudsman, Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah menyurati Disdukcapil Makassar sejak Oktober 2018. Namun, surat itu tidak direspons dan tidak dilaporkan ke Wali Kota Makassar. Sementara itu, Iqbal Suaheb baru mengetahui adanya kejadian itu setelah disampaikan oleh Ombudsman Makassar. Dia pun akan mengambil tindakan tegas kepada jajarannya yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga terjadinya offline SIAK.